



## POTENSI IBU KOTA NUSANTARA (IKN) SEBAGAI KATALISATOR PEMERATAAN EKONOMI DI INDONESIA

Johana Veronika Simanjuntak <sup>1)</sup>; Fadhal Muhammad <sup>2)</sup>; Muhamad Refkhi Al Aqilah <sup>3)</sup>; Nur Ashilah Raihannah <sup>4)</sup>; Herman Seato Graha Putra Bakti <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> hana\_4122230014@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> fadal.muh@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> muhamadrefkhi@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>4)</sup> nur\_4122230017@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>5)</sup> seato\_4122230015@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstract

*The relocation of the capital city has become a global focus for enhancing sustainable development and economic equality. Indonesia, as the largest archipelagic state, faces significant interregional disparities. The majority of the population and economic activities are concentrated on the island of Java, leading to significant regional inequalities. Jakarta, as the administrative center, suffers from population density, pollution, and traffic congestion, which are economically detrimental. The relocation of the capital to East Kalimantan is expected to stimulate economic growth outside Java and promote income equality. This research employs a qualitative method with a literature review approach to analyze the dynamics of Indonesia's capital relocation in the context of income distribution. The analysis indicates that the development of the new capital city presents opportunities and challenges, including enhancing regional connectivity, maintaining an investment-friendly climate, and anticipating negative social impacts. By optimizing opportunities and managing challenges effectively, the capital relocation has the potential to catalyze economic equality in Indonesia.*

**Keywords:** Capital relocation, Economic equality, IKN, Regional disparities

### Abstrak

Pemindahan ibukota negara menjadi fokus global untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, menghadapi ketimpangan antarwilayah yang signifikan. Sebagian besar penduduk dan kegiatan ekonomi terpusat di Pulau Jawa, menyebabkan ketimpangan regional yang signifikan. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, mengalami masalah kepadatan penduduk, polusi, dan kemacetan, yang merugikan secara ekonomi. Pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur diharapkan merangsang pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan meratakan pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literatur review* untuk menganalisis dinamika pemindahan ibukota Indonesia dalam konteks pemerataan pendapatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan Ibukota Negara (IKN) memiliki peluang dan tantangan, termasuk meningkatkan konektivitas wilayah, menjaga iklim investasi, dan mengantisipasi dampak sosial negatif. Dengan mengoptimalkan peluang dan mengelola tantangan dengan baik, pemindahan ibukota berpotensi menjadi katalisator pemerataan ekonomi di Indonesia.

**Kata Kunci:** IKN, Ketimpangan regional, Pemerataan ekonomi, Pemindahan ibu kota

## PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara merupakan fenomena global yang semakin menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan keberlanjutan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Hingga abad ke-20, sejumlah negara telah berhasil melakukan realokasi ibu kota negaranya. Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasília pada tahun 1960 dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tengah negara dan mengurangi ketidakesetaraan regional. Sementara itu, Kazakhstan memutuskan untuk melakukan realokasi ibu kotanya dari Almaty ke Nur-Sultan pada tahun 1997 sebagai langkah untuk mempromosikan pembangunan di wilayah utara yang lebih strategis secara geopolitik (Aziz, 2020). Malaysia pun turut serta dalam tren ini dengan memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1999, sebagai bagian dari inisiatif untuk meratakan pembangunan ekonomi di seluruh negara (Purnama & Chotib, 2022).

Indonesia juga telah mengambil keputusan strategis untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota yang telah lama menjadi ibu kota ke wilayah yang dianggap lebih strategis. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membuat pembangunan



ekonomi menjadi lebih sulit dan pemerataan pendapatan menjadi tidak optimal. Hal ini terlihat dari tabel berikut (Saraswati et al., 2022).

Tabel 1 Persebaran Penduduk dan Kontribusi Ekonomi Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Persentase Persebaran Jumlah Penduduk Secara Nasional (%)	Kontribusi Ekonomi untuk Nasional (%)
Pulau Jawa	57,00%	57,12%
Pulau Sumatera	22,00%	22,16%
Pulau Kalimantan	6,00%	8,08%
Pulau Sulawesi	7,40%	7,25%
Bali dan Nusa Tenggara	5,60%	2,80%
Maluku dan Papua	2,80%	2,59%

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Selama ini, populasi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan cenderung terpusat di Pulau Jawa, yang menyebabkan Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketidakseimbangan dengan pulau-pulau lain di luar Jawa. Mayoritas sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Pulau Jawa bersumber dari wilayah Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kota-kota sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) yang mencapai 20,85 persen. Dalam konteks PDB per kapita, DKI Jakarta menunjukkan angka sebesar Rp274,7 juta, sedangkan rata-rata nasional hanya mencapai Rp62,2 juta. Dengan kata lain, Jakarta memiliki PDB per kapita empat kali lebih besar dibandingkan dengan PDB per kapita rata-rata nasional (Katadata, 2022). Jika situasi ini dibiarkan tanpa upaya yang sungguh-sungguh, ketimpangan akan menjadi lebih buruk.

Terlebih lagi dengan masifnya tingkat urbanisasi di kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta. Hal ini menyebabkan masalah kependudukan Jakarta yang berujung pada persoalan terkait polusi dan kemacetan. Dampak kepadatan lalu lintas yang tinggi di Jakarta menghasilkan kerugian ekonomi sekitar Rp65 triliun setiap tahunnya (The World Bank, 2019). Jakarta tergolong sebagai kota dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen dan menempati peringkat ke-10 sebagai kota paling padat lalu lintas di Asia. Konsekuensinya, setiap peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya berkontribusi pada kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 1,4 persen.

Ketersediaan air bersih di Jawa yang saat ini sedang krisis juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Dari hasil pemodelan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Bappenas, dapat diamati bahwa pulau Jawa mengalami transformasi lahan yang cukup signifikan. Hasil pemodelan ini mencerminkan ketidakseimbangan proporsi dalam penggunaan lahan antara pulau Jawa yang lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Kalimantan, khususnya dalam konteks pemenuhan kebutuhan konsumsi. Dengan melakukan realokasi ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah berharap untuk menciptakan pusat pemerintahan yang baru dengan potensi untuk menjadi magnet ekonomi di wilayah timur Indonesia. Hal ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, memberikan peluang pekerjaan baru, dan meratakan pendapatan di seluruh negeri.



Pemindahan ibu kota ke provinsi dengan konektivitas yang baik dengan provinsi lain dapat terjadi peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% di wilayah Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022). Selain itu, langkah ini berpotensi untuk merangsang perdagangan antar wilayah, mendukung investasi di provinsi yang menjadi ibu kota negara baru dan di sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi. Hasilnya, akan tercipta nilai tambah ekonomi yang didorong oleh sektor-sektor non-tradisional di berbagai wilayah di luar Jawa. Deputy Pengembangan Regional Bappenas memperkirakan dampak realokasi ibu kota tersebut akan menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional 0,1 sampai 0,2 persen (Bappenas, 2019).

Penelitian ini akan menggali lebih dalam dinamika pemindahan ibu kota negara Indonesia dalam rangka menuju *high income country* yang salah satu indikatornya adalah pemerataan pendapatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif kepada para pembuat kebijakan untuk merancang langkah-langkah yang efektif dalam mencapai tujuan pemerataan ekonomi dan keberlanjutan dalam konteks pemindahan ibu kota negara.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Kutub Pertumbuhan dan Konektivitas Antarpulau**

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Jawa bertujuan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, terutama Kawasan Timur Indonesia yang saat ini masih memiliki kontribusi ekonomi yang terbatas bagi Indonesia. Diharapkan dengan memindahkan IKN dapat memunculkan pusat perekonomian baru di Wilayah Timur Indonesia.

Konsep pertumbuhan pada dasarnya menyoroti bahwa pusat perekonomian tidak akan muncul dengan sendirinya; pusat pertumbuhan ekonomi baru tidak akan timbul tanpa adanya inovasi dan teknologi yang didorong oleh perusahaan atau industri yang beraglomerasi di suatu wilayah. (Silalahi, 2019). Maka dari itu, dengan adanya pemindahan ibukota ini akan mengalihkan fokus pemerintah pusat ke wilayah Kalimantan. Berbagai program berskala nasional mencakup infrastruktur dan investasi akan digelontorkan dan akhirnya akan dapat meningkatkan ekonomi wilayah tersebut. Munculnya Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru tentu akan memberikan dampak baik bagi perekonomian daerah di sekitarnya sesuai dengan konsep “*growth pole*” atau kutub pertumbuhan.

Konsep kutub pertumbuhan diperkenalkan oleh ekonom Prancis, Francois Perroux, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah tidak terjadi secara acak, tetapi terpusat di lokasi tertentu (Putra, 2020a). Secara fungsional, pusat pertumbuhan ini pada akhirnya akan mampu menstimulasi perekonomian baik ke dalam wilayahnya, maupun bagi wilayah sekitarnya (Saputra & Hidayat, 2023). Untuk meningkatkan perekonomian wilayah sekitarnya, diperlukan konektivitas yang baik antar wilayah guna mendukung pusat perekonomian tersebut. Konektivitas meningkatkan interaksi antar wilayah dan mendorong pembentukan pusat-pusat ekonomi baru yang pada akhirnya dapat mendukung perkembangan daerah-daerah pinggiran (Sumardjoko & Akhmadi, 2019).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2015), konektivitas atau koneksi merupakan hubungan yang dapat mempermudah seluruh kegiatan. Konektivitas memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah kepulauan seperti Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau memberikan tantangan tersendiri dalam hal pemerataan ekonomi. Kurangnya sarana dan infrastruktur menyebabkan konektivitas antar pulau rendah dan pada akhirnya akan menghambat tujuan pertumbuhan ekonomi.



### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pemindahan ibu kota negara seringkali dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, pembagian kerja dan spesialisasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Pemindahan ibu kota dapat menciptakan pusat-pusat baru untuk aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat merangsang investasi, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja, yang semuanya merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Sukirno (2002) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat serta peningkatan kemakmuran masyarakat. Peningkatan kemampuan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah dan peningkatan kualitas faktor produksi. Dengan hadirnya IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru, jumlah produksi barang dan jasa di regional tersebut akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh secara organik.

Menurut Ali Ibrahim Hasyim (2016), ada tiga komponen dasar yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, yaitu (1) peningkatan terus-menerus dalam ketersediaan barang; (2) teknologi canggih sebagai faktor kunci yang menentukan tingkat pertumbuhan dalam menyediakan berbagai macam barang bagi penduduknya; (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien membutuhkan penyesuaian dalam hal kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat dimanfaatkan dengan benar.

Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan produksi barang dan jasa oleh masyarakat secara berkelanjutan yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan PDRB berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

### **Investasi**

Investasi adalah pengalokasian dana atau sumber daya oleh individu atau perusahaan untuk menambah atau mengganti stok aset yang dimiliki (Mankiw, 2020). Investasi dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Menurut Keynes (2007), dalam menentukan untuk melakukan investasi individu atau perusahaan mempertimbangkan tingkat keuntungan dari investasi dan suku bunga. Investasi dari luar negeri dilakukan biasanya didorong oleh ketersediaan tenaga kerja yang murah dan sumber daya alam. Di samping itu, (Septiantoro et al., 2020) mengungkapkan bahwa kualitas institusi pemerintah adalah faktor yang menentukan arus masuk investasi dari luar negeri. Daude & Stein (2007) merinci aspek institusi yang dimaksud adalah kestabilan politik, kepastian hukum, hambatan regulasi dan kebijakan publik, dan komitmen pemerintah dalam menyambut investasi. Singh dan Jun (1995) menambahkan kebijakan di bidang perpajakan juga menjadi determinan investasi.

Investasi memiliki andil yang signifikan dalam pembangunan suatu negara karena memiliki dampak yang luas pada ekonomi. Secara makro, investasi merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang meningkat dicirikan dengan meningkatnya kapasitas produksi sebagai hasil dari kenaikan investasi. Investasi lebih baik dalam menopang pertumbuhan dibandingkan konsumsi karena Investasi yang dilakukan dalam skala besar akan berkontribusi pada peningkatan produksi (Mankiw, 2020). Sementara itu, dalam konteks ekonomi pembangunan, investasi merupakan elemen kunci yang mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat karena investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Hastuti dan Dewati, 2017). Dengan bertambahnya investasi, tercipta kesempatan kerja baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka



pengangguran. Selain itu, investasi perintis di daerah tertinggal dapat membantu mengurangi ketidakesetaraan antar daerah dan kemiskinan (Todaro & Smith, 2015).

**Urbanisasi dan Konsumsi**

Urbanisasi adalah fenomena sosial yang berkaitan dengan perpindahan penduduk dari desa atau wilayah non-urban ke kota atau wilayah urban (Moreno, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urbanisasi adalah perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa ke kota besar.

Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan yang Kota adalah sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai oleh kepadatan tinggi dan beragamnya strata sosial ekonomi, yang seringkali materialistis. Kota juga dapat dianggap sebagai benteng budaya yang muncul dari unsur-unsur alami dan buatan, dengan ciri pemusatan penduduk yang signifikan dan kehidupan yang heterogen dan materialistis, terutama di daerah sekitarnya. (Bintarto, 1977).

Perkotaan merujuk pada status suatu wilayah administratif setara dengan desa atau kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Sebuah daerah dikatakan memenuhi kriteria apabila ketiga faktor berikut berupa kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, serta adanya fasilitas perkotaan pada lokasi tersebut telah memenuhi skor tertentu yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Perkotaan

Kriteria				Keberadaan/akses pada fasilitas Perkotaan		
Kepadatan Penduduk Per Km2	Nilai / Skor	Persentase Rumah Tangga Pertanian	Nilai / Skor	Fasilitas Perkotaan	Kriteria	Nilai/ Skor
< 500	1	>70,00	1	Sekolah Taman Kanak-kanak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada atau &lt;= 2,5 Km</li> <li>• &gt;2,5 Km</li> </ul>	1
500 - 1249	2	50,00 - 69,99	2	Sekolah Menengah Pertama		0
1250 - 2499	3	30,00 - 49,99	3	Sekolah Menengah Umum		
2500 - 3999	4	20,00 - 29,99	4	Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada atau &lt;= 2 Km</li> <li>• &gt;2 Km</li> </ul>	1
4000 - 5999	5	15,00 - 19,99	5	Pertokoan		0
6000 - 7499	6	10,00 - 14,99	6	Bioskop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada atau &lt;= 5 Km</li> <li>• &gt;5 Km</li> </ul>	1
7500 - 8499	7	5,00 - 9,99	7	Rumah Sakit		0
>8500	8	<5,00	8	Hotel / Bilyar / Diskotek / Panti Pijat / Salon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada</li> <li>• Tidak Ada</li> </ul>	1 0
				Persentase RT Telepon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;=8,00</li> <li>• &lt; 8,00</li> </ul>	1 0



Kriteria				Keberadaan/akses pada fasilitas Perkotaan		
Kepadatan Penduduk Per Km2	Nilai / Skor	Persentase Rumah Tangga Pertanian	Nilai / Skor	Fasilitas Perkotaan	Kriteria	Nilai/ Skor
				Persentase RT Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <math>\geq 90,00</math></li> <li>● <math>&lt; 90,00</math></li> </ul>	1 0

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010)

Sebuah daerah dikatakan sebagai kota apabila mendapatkan skor 10 berdasarkan penilaian di atas. Kota memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disebabkan karena kota biasanya menjadi pusat kegiatan ekonomi termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang berkontribusi signifikan terhadap PDB suatu negara. Pemusatan kegiatan ekonomi ini akan lebih memudahkan para aktor ekonomi untuk mencari supplier sekaligus konsumen hasil produksi mereka tanpa mengeluarkan biaya transportasi atau penelitian yang lebih besar. Hal ini kemudian akan memicu proses industrialisasi yang kemudian akan membuka lowongan pekerjaan dan meningkatkan PDB negara tersebut. (Todaro & Smith, 2015)

Pertumbuhan ekonomi di kota-kota dapat didorong oleh berbagai faktor, termasuk akumulasi modal, investasi baru, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan infrastruktur dan sarana pembangunan. Selain itu, kota-kota juga sering menjadi pusat inovasi dan teknologi, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Semua itu dapat terwujud akibat jumlah penduduk di kota yang begitu besar. Jumlah penduduk berkaitan erat dengan peluang konsumsi dan investasi, sehingga semakin tingginya peluang tersebut maka kegiatan konsumsi dan investasi akan lebih mudah mengalir di perkotaan yang kemudian meningkatkan PDB dan akhirnya menciptakan peluang konsumsi dan investasi baru lainnya (Quistorff, 2015). Pada konteks Indonesia, setiap pertumbuhan 1 persen penduduk perkotaan akan meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019).

Kota-kota besar seperti Jakarta, yang merupakan ibu kota dan pusat bisnis Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Dengan sektor ekonomi yang beragam, seperti perbankan, perdagangan, dan manufaktur, kota-kota ini menciptakan lapangan kerja, peluang investasi, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hal ini kemudian akan meningkatkan konsumsi sekaligus investasi yang dilakukan masyarakat di perkotaan (Todaro & Smith, 2015). Konsumsi dan Investasi merupakan salah satu unsur perhitungan PDB suatu negara. Sehingga semakin tinggi tingkat konsumsi dan investasi suatu negara maka semakin tinggi PDB negara tersebut. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat populasi suatu kota, maka PDB atau PDRB di negara tersebut akan semakin besar.

**Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja, yang menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara karena berkaitan dengan produksi ekonomi secara keseluruhan. Pengangguran terjadi ketika anggota tenaga kerja yang ingin bekerja tidak berhasil mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan cirinya, terdapat empat jenis pengangguran, antara lain pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan setengah menganggur. Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan tingkat pengangguran terbuka, di mana jenis pengangguran ini menggambarkan semua orang dalam angkatan kerja



yang sedang mencari pekerjaan, termasuk yang sedang mencari pekerjaan pertama kali dan yang sebelumnya pernah bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan oleh tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja atau pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini bisa disebabkan lowongan kerja yang tumbuh lebih rendah daripada penambahan tenaga kerja atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan yang tersedia dengan latar belakang pendidikan. Kejadian ini mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun atau kemunduran perkembangan industri di daerah tersebut.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Salah satu upaya tersebut adalah pemerataan kesempatan melalui pemindahan ibu kota negara. Tujuan dari pembangunan IKN adalah untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dengan mendirikan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Dengan memindahkan ibu kota negara, diharapkan pembangunan tidak hanya terfokus pada Jakarta. Rencana ini mendukung pembangunan merata di seluruh Indonesia dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekonomi ini diharapkan berkat kontribusi dari kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota terkait IKN. Di sisi lain, dengan terjadinya peningkatan perekonomian dapat meningkatkan pula jumlah lapangan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran di provinsi Kalimantan Timur (Yanuar, 2006). Jika tingkat pengangguran menurun, jumlah orang yang bekerja akan meningkat, sehingga jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan akibat pendapatan rendah juga akan menurun.

Menurut Borjas, (2013) dalam bukunya yang berjudul *Labor Economics*, laju pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan tingkat pengangguran, di mana ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat pengangguran menurun. Ketika terdapat pengangguran yang diakibatkan rendahnya aktivitas ekonomi, peran pemerintah diperlukan dalam mendorong permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan terjadinya peningkatan konsumsi yang berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan. Hal ini tentunya akan menurunkan angka pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi dan menstimulasi permintaan agregat akan berpengaruh pada tingkat pengangguran di negara tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan *literature review*. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan berbagai dokumen sumber seperti buku, jurnal, artikel, dokumen resmi pemerintah, dan artikel di media massa yang sesuai dengan topik yang dibahas. Setelah data penelitian diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan mengaitkan tema dan menyusun secara sistematis hasil temuan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potensi Pemerataan Ekonomi Konektivitas Pulau Kalimantan**

Kalimantan Timur yang terletak di tengah Indonesia dan masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dapat menjadi keunggulan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Terpilihnya IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur membuat berbagai proyek nasional dianggarkan untuk membangun IKN agar siap menjadi ibu kota negara yang baru. Berbagai proyek pembangunan bandara, pelabuhan, rel kereta api dan jalan tol telah direncanakan untuk mendukung suksesnya perpindahan ibu kota ke Kalimantan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, IKN dibangun dengan mengedepankan prinsip kota yang terhubung.



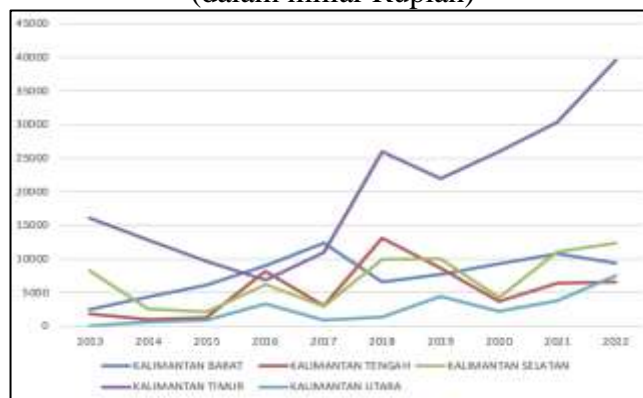
Jaringan transportasi akan dikembangkan sesuai dengan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang melalui konektivitas antara pusat ekonomi dan infrastruktur utama seperti bandara dan pelabuhan. Pembangunan rel kereta api dan tol yang menghubungkan IKN dengan kota penunjang disekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya sehingga tidak terjadi disparitas harga yang begitu jauh. Selain pembangunan infrastruktur untuk transportasi darat, pemerintah juga tengah membangun pelabuhan laut dan udara di sekitar IKN dan meningkatkan kapasitas pelabuhan laut dan udara yang berada di sekitar IKN (khususnya yang berada di kota-kota penunjang IKN).

Konektivitas yang baik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Contoh keberhasilan konektivitas yang dapat mendukung pemerataan ekonomi adalah dengan dibangunnya banyak pelabuhan di wilayah timur Indonesia yang telah berhasil menurunkan disparitas harga kebutuhan pokok. Menurut laporan Republika dan data statistik dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim, terjadi penurunan disparitas harga yang signifikan, sekitar 30% hingga 40% pada tahun 2016 (Syahrin, 2018). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumardjoko & Akhmadi, 2019) di Jawa Timur yang mendapati bahwa pengembangan infrastruktur konektivitas menjadi penggerak ekonomi lokal yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain oleh (Senuk et al., 2019) di Provinsi Maluku Utara yang menyebutkan bahwa konektivitas antar wilayah yang baik dapat menunjang proses kegiatan ekonomi daerah semakin berkembang dan berpengaruh positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan konektivitas yang baik, IKN sebagai pusat perekonomian baru dapat menjadi katalisator bagi pemerataan ekonomi di Indonesia.

**Investasi**

Dalam pembangunan IKN dapat diterapkan strategi pertumbuhan kutub dengan memusatkan investasi dan pengembangan infrastruktur di IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (Putra, 2020). Dengan pendekatan ini, IKN berpotensi menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menarik investasi dan migrasi tenaga kerja, serta merangsang pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, khususnya di Pulau Kalimantan sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan IKN, yaitu untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.

Gambar 3. Investasi dalam negeri per Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2013 s.d. 2022 (dalam miliar Rupiah)



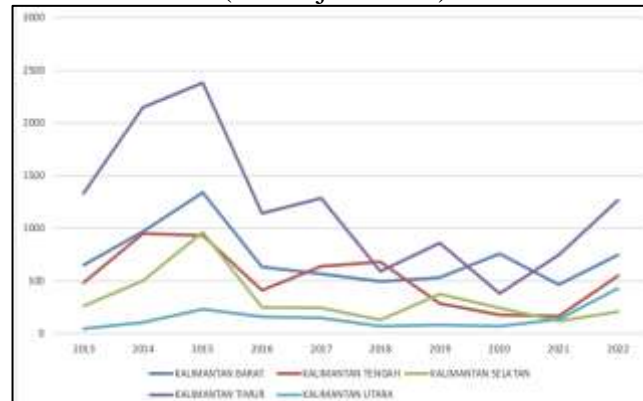
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Jika ditelisik berdasarkan data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Pulau Kalimantan dalam periode 2013 s.d. 2022, Kalimantan Timur memiliki nilai PMDN tertinggi sejak tahun 2018 dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan investasi yang solid dan signifikan sepanjang periode satu dekade terakhir, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan jumlah PMDN sebesar Rp39.595,6



miliar. Menurut (Akhmadi & Himawan, 2021), pemerintah menggunakan tiga skema untuk membiayai proyek pembangunan jalan ibu kota baru, yaitu melalui belanja modal APBN, penugasan BUMN, dan KPBU di mana skema ini digunakan dengan mempertimbangkan arus kas skenario proyek yang mempunyai nilai NPV negatif. Menurut Bahlil sebagaimana dikutip dalam laman Kementerian Investasi (2023), investor lokal telah berperan besar dalam kemajuan pembangunan proyek IKN. Beberapa investor tersebut di antaranya adalah Agung Sedayu Group (ASG) dan Wings Group.

Gambar 4. Investasi luar negeri per Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2013 s.d. 2022 (dalam juta USD)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Selain itu, berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA), dalam periode tahun 2013 s.d. 2022 Kalimantan Timur tetap mendominasi di antara seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, meskipun pergerakannya mengalami fluktuasi. Nilai PMA mengalami tren menurun hingga tahun 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan tren meningkat pada tahun 2021 dan 2022, dengan puncak tertinggi pada tahun 2015 dengan USD 2.381,4 juta.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Laporan Perekonomian Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (2023), PMDN di Kalimantan Timur terus meningkat bahkan hingga tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 11,55% pada triwulan I tahun 2023. Pertumbuhan yang konsisten tersebut membuat investasi dalam negeri memiliki pangsa sebesar 28,45% dari PDRB. Andil tersebut memberikan andil terbesar kedua setelah komponen ekspor dalam struktur PDRB Kalimantan Timur. Kenaikan ini didukung oleh perbaikan investasi lapangan usaha sekunder dan tersier. Selain itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan investasi di Kalimantan timur akan tumbuh positif didukung oleh pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan optimisme kinerja lapangan usaha utama di Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur tersebut salah satunya merujuk pada proyek strategis pembangunan IKN yang memberi kontribusi terhadap peningkatan investasi di Kalimantan Timur. Kenaikan investasi ditopang oleh progres pembangunan IKN Tahap I yang sudah mencapai 52,89% pada November 2023 (Rachman, 2023).

Pada tahun 2023, total investasi untuk pembangunan IKN sebesar Rp41,4 triliun rupiah (Otorita IKN, 2023). Berdasarkan sumbernya, investasi tersebut didominasi oleh investor dalam negeri. Kontribusi swasta dalam investasi tersebut sebanyak 22 proyek dengan nilai investasi sejumlah Rp31,8 triliun. Hal ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan yang menetapkan bahwa kontribusi APBN dalam pembangunan IKN dipatok hanya 20% dan sisanya bersumber dari swasta.

Demi keberlanjutan pembangunan IKN, pemerintah gencar memasarkan IKN. Upaya pemerintah diantaranya menyelenggarakan promosi, salah satunya kegiatan Marketing Investasi Indonesia (MII). Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa kemudahan



berusaha dengan menurunkan tarif pajak untuk investor yang mau berinvestasi di IKN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara (2023), pemerintah memberikan fasilitas Pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar 0%, Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 0% selama 10 tahun, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 0%, Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 0% selama 10 tahun, dan Bea masuk sebesar 0% (Isma, 2023). Hingga akhir tahun 2023, Otorita IKN telah mengantongi lebih dari 330 *Letter of Intention* (LOI) dari investor yang tertarik menanamkan modal untuk pembangunan IKN.

Pada tahun 2024, pembangunan IKN akan terus disebut oleh pemerintah mengingat target penyelesaian tahap I yang semakin dekat. Beberapa proyek yang sedang dibangun di tahun 2024 diantaranya adalah pembangunan hotel dengan nilai investasi sejumlah Rp20 miliar, Nusantara *Superblock* dengan nilai investasi sebesar Rp3 triliun, dan pembangunan hunian ASN dan TNI/Polri sebanyak 239 tower dengan total investasi sebesar Rp41,2 triliun. Selain itu, ada juga proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan (Otorita IKN, 2023).

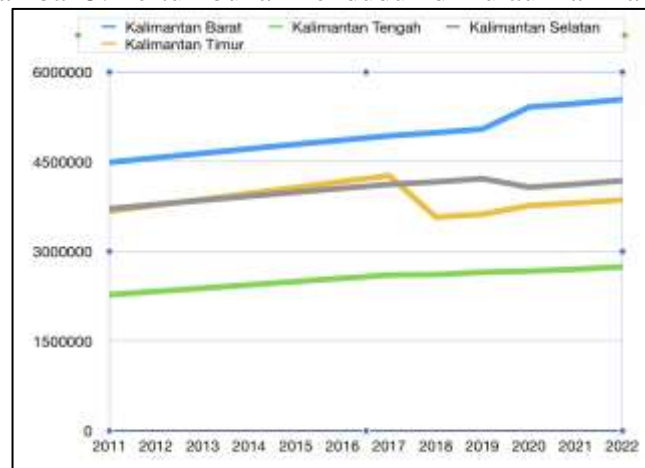
Berdasarkan capaian dan potensi investasi dalam rangka pembangunan IKN, pemindahan ibu kota negara ke Nusantara dapat menjadi potensi pemerataan ekonomi di Indonesia. Peluang investasi yang besar dan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas ekonomi di Kalimantan Timur dan memberi *Spread Effect* di wilayah sekitarnya (Putra, 2020; Hastuti & Dewati, 2017).

Hal ini sesuai dengan bukti empiris bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur (Hartini, 2009 dan Sumantri, 2008 sebagaimana dikutip dalam Dharma & Djohan, 2015). Selain itu, terhadap investasi di kota sekitar IKN, juga akan mengalami dampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang membuktikan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda.

**Populasi**

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pertumbuhan penduduk di Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Pertumbuhan Penduduk di Pulau Kalimantan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dalam konteks Pulau Kalimantan, observasi terhadap tren peningkatan jumlah populasi dari tahun ke tahun memberikan dimensi yang menarik untuk dipelajari secara lebih rinci. Walaupun data yang digunakan bersifat proyektif, namun arah proyeksinya pada umumnya sejalan dengan hasil sensus populasi yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia setiap dekade. Meskipun tahun 2019 menjadi saksi dari guncangan signifikan akibat pandemi global Covid-19, tiap provinsi di Pulau Kalimantan berhasil menunjukkan ketahanan dengan



mencatatkan pertumbuhan populasi yang tetap positif. Perlu dicatat bahwa dalam ruang lingkup penelitian ini, data dari Kalimantan Utara diabaikan karena masih berstatus sebagai provinsi baru dengan jumlah populasi yang relatif terbatas.

Selaras dengan temuan sebelumnya yang diungkap oleh Quistorff (2015) dan Kementerian PUPR, harapan muncul bahwa pertumbuhan jumlah penduduk ini dapat memberikan dampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Kalimantan. Dari penelitian tersebut diharapkan kenaikan PDRB dengan asumsi setiap kenaikan sebesar 1% dalam jumlah populasi diikuti oleh peningkatan sekitar 1,4% dalam PDRB.

Perlu diperhatikan bahwa meskipun menghadapi tantangan besar seperti pandemi global pada tahun 2019, Pulau Kalimantan berhasil mempertahankan kestabilan dalam pertumbuhan populasi, mencerminkan ketahanan dan kemampuan adaptasi wilayah tersebut terhadap gejolak eksternal sehingga cocok dijadikan sebagai sebuah ibukota. Walau demikian, perlu dicatat bahwa asumsi tentang hubungan positif antara pertumbuhan populasi dan PDRB masih memerlukan pengujian dan analisis lebih lanjut untuk memahami dengan lebih mendalam kompleksitas faktor-faktor yang terlibat. Menurut Akhmadi (2022), perhitungan laju pertumbuhan penduduk IKN belum dapat dilakukan dikarenakan pembangunan IKN masih pada tahap awal. Namun, estimasi kepadatan penduduk dapat dilakukan dengan memperhitungkan proyeksi jumlah penduduk di wilayah IKN dan kawasan pengembangan IKN, di mana berdasarkan asumsi populasi yang diterbitkan dalam media *online*, yaitu sekitar 4,5 juta jiwa.

### ***Tingkat Pengangguran***

Tingkat pengangguran dalam suatu negara menjadi parameter krusial untuk mengukur kesehatan ekonomi dan stabilitas ketenagakerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya perubahan pola tingkat pengangguran yang mencerminkan dinamika ekonomi wilayah Kalimantan sebagaimana terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Kalimantan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Terlihat bahwa provinsi di Kalimantan dengan tingkat pengangguran terendah dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Kalimantan Timur. Pada tahun 2013 sampai dengan 2016, secara garis besar provinsi-provinsi tersebut mengalami tren kenaikan tingkat pengangguran terbuka. Kalimantan Timur sendiri mencapai TPT tertinggi selama 10 tahun terakhir pada tahun 2016, yaitu mencapai 0.080. Hal ini selaras juga dengan penurunan PDRB pada tahun tersebut hingga 0,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, mulai tahun 2017 sampai dengan 2019 TPT di Kalimantan terlihat perlahan menurun yang mencerminkan aktivitas perekonomian dan daya



saing pasar tenaga kerja yang baik. Pada tahun 2020 angka TPT di Kalimantan seluruhnya kembali meningkat. Beberapa hal diidentifikasi sebagai penyebab peningkatan tersebut, yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan perubahan dalam struktur industri. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan dampak ekonomi yang signifikan. Pembatasan pergerakan, *lockdown*, dan penurunan aktivitas ekonomi menjadi penyebab banyak perusahaan menghadapi kesulitan dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Provinsi-provinsi di Kalimantan tidak terhindar dari dampak tersebut, dan tingkat pengangguran melonjak drastis hingga 6,9% di Kalimantan Timur, 5,8% di Kalimantan Barat, 4,7% di Kalimantan Selatan, dan 4,5% di Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2021 dilakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional sehingga terjadi penurunan TPT meskipun tidak terlalu signifikan. Penurunan terus terjadi hingga tahun 2022 penurunan TPT secara drastis terlihat terutama di Provinsi Kalimantan. Timur. Hal ini merupakan tanda telah terjadi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu yang juga berpotensi memberikan dampak positif pada pasar tenaga kerja dalam beberapa tahun mendatang.

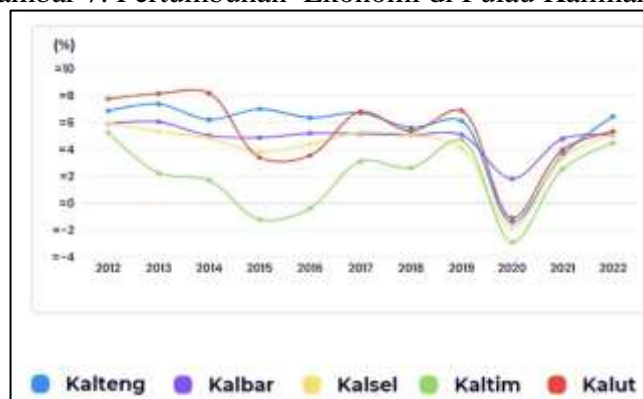
Jika dikaitkan dengan rencana perpindahan ibu kota negara ke Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur, diperkirakan penurunan ini juga disebabkan oleh dampak jangka pendek pembangunan IKN. Dalam jangka pendek, pembangunan IKN akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan, terutama lapangan pekerjaan terkait persiapan infrastruktur. Itu berarti, pembangunan IKN yang sedang berlangsung saat ini juga berkontribusi dalam penurunan angka TPT di Kalimantan. Bahkan TPT pada tahun 2022 di Kalimantan Timur merupakan tingkat pengangguran terendah selama 10 tahun terakhir. Hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Amila et al., (2023).

Adapun untuk dampak jangka menengah dan panjang pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di IKN dan sekitarnya karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi dan berkembangnya sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini berasal dari potensi peningkatan perdagangan antar wilayah, khususnya perdagangan antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Berkembangnya sektor ekonomi tentunya dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru dan berujung pada berkurangnya tingkat pengangguran.

**Pertumbuhan Ekonomi**

Pemindahan pusat pemerintahan negara dapat dianggap sebagai langkah strategis dalam mendukung pemerataan ekonomi. Dengan memindahkan pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi dari suatu wilayah ke wilayah lain, pemerintah memiliki potensi untuk menciptakan peluang dan kesempatan yang lebih merata di seluruh negara. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan selama 2012-2022.

Gambar 7. Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Kalimantan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023



Secara garis besar, pertumbuhan perekonomian Kalimantan Timur menjadi yang terendah sementara Kalimantan Tengah tumbuh cukup stabil dan meningkat. Adanya keseragaman dalam penurunan pertumbuhan ekonomi pada 2020 dan 2021 diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan resesi ekonomi karena adanya pembatasan pergerakan, penutupan bisnis, dan penurunan kepercayaan konsumen. Bisnis merasakan tekanan keuangan yang signifikan, terjadi peningkatan tingkat pengangguran, dan sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan dan pariwisata, terpuak paling berat. Meskipun demikian, di tahun selanjutnya PDRB di Pulau Kalimantan mulai pulih. PDRB Kalimantan Timur merupakan yang paling tinggi pada 2022 sebesar Rp506,2 Triliun, jauh melampaui provinsi-provinsi tetangganya yang hanya di kisaran angka Rp66 sampai Rp148 Triliun.

Nilai PDRB yang sudah tergolong besar pada Kalimantan Timur membuat pertumbuhan ekonominya menjadi terbatas. Pada tahun 2022, perekonomian calon ibu kota negara baru ini didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi sekitar 46% terhadap total PDRB-nya. Tingginya angka kontribusi dari sektor pertambangan di Kalimantan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi fluktuatif karena bisnis pertambangan berkorelasi erat dengan harga-harga komoditas dunia.

Hambatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur bukanlah karena faktor pendidikan, sumber daya manusia (SDM), atau ketenagakerjaan, tetapi karena infrastruktur, regulasi, dan institusi yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar di wilayah Kalimantan Timur masih rendah dan belum terintegrasi. Dengan rencana pemindahan ibu kota, Kalimantan Timur diharapkan dapat bertransformasi dari provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Kalimantan menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia di masa mendatang. Dampak ini juga akan menjadi katalis pertumbuhan bagi provinsi-provinsi di sekitarnya.

Indikator pertumbuhan ekonomi merupakan kumulatif dari indikator-indikator yang telah disampaikan di atas, seperti konektivitas, populasi, pengangguran, dan investasi. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut melalui beberapa mekanisme. Pertama, pemindahan ibu kota akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya, yang akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain di Indonesia. Kedua, pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk ibu kota baru akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong konektivitas sosial dan ekonomi di Kalimantan. Pemindahan ibu kota diharapkan akan mempercepat perdagangan antar wilayah di Indonesia, di mana lebih dari setengah wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan arus perdagangan. Ketiga, pemindahan ibu kota bertujuan untuk melakukan pemerataan penduduk dan ekonomi di daerah-daerah luar Jawa, yang akan membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung pemerataan pendapatan.

### ***Tantangan Pemerataan Ekonomi***

Ada tiga tantangan yang dihadapi pemerintah dalam rangka mengawal peningkatan pembangunan di IKN dan mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pertama, pemerintah harus menjaga momentum IKN sebagai incaran para investor. Pemerintah perlu menjaga stabilitas politik di dalam negeri serta konsistensi kebijakan terkait pemindahan ibu kota negara mengingat kualitas institusi merupakan faktor yang mempengaruhi investasi (Singh & Jun, 1995; Daude & Stein, 2007). Hal ini penting dalam rangka menjaga daya tarik IKN sehingga dapat memikat investor terutama investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di IKN sehingga pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana dan dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Kedua, pembangunan IKN merupakan proyek sangat penting dan strategis. Pembangunan IKN juga berhubungan dengan anggaran yang besar sehingga rawan terjadi



penyelewengan. Untuk itu, program ini harus disertai dengan pengawasan yang memadai dan bernilai tambah. Selain risiko kegagalan program yang dapat muncul apabila pembangunan IKN diwarnai dengan tindak korupsi, daya tarik untuk investasi di IKN juga akan menurun apabila pemerintah Indonesia, khususnya Otorita IKN tidak mampu menunjukkan kualitas institusi yang sehat (Septiantoro et al., 2020).

Ketiga, pembangunan di IKN dan Kalimantan Timur yang pesat dalam jangka pendek akan menimbulkan ketimpangan sementara dengan wilayah di sekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan dampak sosial yang perlu dimitigasi, antara lain peningkatan jenis dan jumlah aktivitas ekonomi informal, peningkatan kriminalitas, dan peningkatan konflik sosial.

## **PENUTUP**

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur memiliki potensi untuk menjadi katalisator pemerataan ekonomi di Indonesia. Terdapat lima peluang yang dapat dioptimalkan, yaitu konektivitas antar wilayah, iklim investasi, tingkat pengangguran, jumlah populasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat pula tiga tantangan yang perlu diantisipasi, seperti sensitivitas iklim investasi terhadap kualitas institusi dan stabilitas politik, serta risiko dari penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pengembangan ibukota baru dapat meningkatkan aktivitas ekonomi informal, kriminalitas, dan konflik sosial, sehingga mitigasi yang tepat diperlukan untuk menghindari dampak negatif ini.

### **Saran**

Untuk mengoptimalkan potensi pemindahan ibukota sebagai katalisator pemerataan ekonomi, pemerintah perlu fokus pada meningkatkan konektivitas antar wilayah di Ibukota Negara Baru (IKN), menjaga stabilitas politik dan kualitas institusi, serta mengendalikan aktivitas ekonomi informal, kriminalitas, dan konflik sosial di wilayah tersebut. Selain itu, langkah-langkah untuk menstabilkan tingkat pengangguran dan meningkatkan jumlah populasi perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan IKN. Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta mencapai tujuan pemerataan ekonomi yang lebih luas di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmadi, M. H. (2022). *Menggagas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Ibukota Nusantara*. <https://penerbitan.pknstan.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/IKN-NUSANTARA.pdf>
- Akhmadi, M. H., & Himawan, A. R. (2021). *Determination of Financial Feasibility of Indonesia's New Capital Road Construction Project Using Scenario Analysis*. *Journal of the Malaysian Institute of Planners* Volume 19 Issue 3. <https://www.planningmalaysia.org/index.php/pmj/article/view/998/694>
- Amila, S., Agung Nugraha, A., Sukron, A., Rohmah, F., & Abdurrahman Wahid Pekalongan, U. K. (2023). *Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia (Vol. 2, Issue 1)*.
- Aziz, N. L. L. (2020). *Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned dari Negara Lain*. *Jurnal Kajian Wilayah*, 10(2), 37. <https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Ekonomi Indonesia Triwulan III-2023 (y-on-y)*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2000/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2023-tumbuh-4-94-persen--y-on-y-.html>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx?Kategori=kalimantan%20timur&Periode=>



- Bappenas. (2019). *Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Bappenas Bahas Hasil Penilaian Kalimantan Timur Sebagai Calon Ibu Kota Negara*. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-bappenas-bahas-hasil-penilaian-kalimantan-timur-sebagai-calon-ibu-kota-negara>
- Bintarto, R. (1977). *Pengantar Geografi Kota*. U.P. Spring Yogyakarta.
- Borjas, G. J. (2013). *Labor Economics*. McGraw-Hill.
- Daude, C., & Stein, E. (2007). *The Quality of Institutions and Foreign Direct Investment*. *Economics & Politics*, 19(3). <https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2007.00318>.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Dharma, B. D., & Djohan, S. (2015). *Pengaruh Investasi dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kota Samarinda*.
- Hastuti, F., & Dewati, W. (2017). *Investment-Less Growth: Studi Empiris Determinan dan Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Total Faktor Produktivitas (Studi Kasus: Indonesia)*. Bank Indonesia Working Paper.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Kencana.
- Katadata. (2022). *Capai Rp 274 juta, PDRB Per Kapita DKI Jakarta Tertinggi Nasional*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/09/capai-rp-274-juta-pdrb-per-kapita-dki-jakarta-tertinggi-nasional-pada-2021>
- Katadata. (2023). *10 Kota dengan Penduduk Terbanyak di Dunia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/28/10-kota-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-tokyo-teratas>
- Kementerian Investasi. (2023). *Kunjungi IKN dengan Investor Lokal, Menteri Investasi Pastikan Investasi Dikuasai Dalam Negeri*. <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/kunjungi-ikn-dengan-investor-lokal-menteri-investasi-pastikan-investasi-dikuasai-dalam-negeri>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2019). *Pengembangan Kota-Kota Di Luar Pulau Jawa Tingkatkan Pemerataan Pembangunan*.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). *IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City*.
- Keynes, J. M. (2007). *The General Theory of Employment, Interest and Money*.
- Mankiw, N. G. (2020). *Macroeconomics (9th ed.)*. Worth Publishers.
- Moreno, E. L. (2017). *Concepts, definitions and data sources for the study of urbanization: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. In *United Nations Expert Group Meeting on Sustainable Cities, Human Mobility and International Migration*. <https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/27/papers/II/paper-Moreno-final.pdf>
- Otorita IKN. (2023). *Investor Pelopor di Tahun 2023 Telah Groundbreaking di IKN, Total Nilai Estimasi Investasi RP41 Triliun*. <https://www.ikn.go.id/en/23-investor-pelopor-di-tahun-2023-telah-groundbreaking-di-ikn-total-nilai-estimasi-investasi-rp41-triliun>
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia (2010). [https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Perka\\_BPS\\_No\\_37\\_Tahun\\_2010\\_\\_Klasifikasi\\_Perkotaan\\_dan\\_Perdesaan\\_Di\\_Indonesia\\_Buku\\_2\\_-\\_Jawa\\_1659514400.pdf](https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Perka_BPS_No_37_Tahun_2010__Klasifikasi_Perkotaan_dan_Perdesaan_Di_Indonesia_Buku_2_-_Jawa_1659514400.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara* (2023).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara* (2022).



- Purnama, S. J., & Chotib. (2022). *Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/3486/1100>
- Putra, M. (2020a). *Growth Pole Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. <https://feb.ub.ac.id/en/growth-pole-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia/29640/#:~:text=KONSEP%20%20E2%80%9Cgrowth%20pole%E2%80%9D%20atau%20dikenal,tempat%2C%20melainkan%20di%20lokasi%20tertentu>
- Putra, M. (2020b). *Growth Pole Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. <https://feb.ub.ac.id/en/growth-pole-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia/29640/#:~:text=KONSEP%20%20E2%80%9Cgrowth%20pole%E2%80%9D%20atau%20dikenal,tempat%2C%20melainkan%20di%20lokasi%20tertentu>.
- Quistorff, B. (2015). *Capitalitis? Effects of the 1960 Brazilian Capital Relocation: Effects of the 1960 Brazilian Capital Relocation*.
- Rachman, A. (2023). *Gencar Bangun IKN, Ekonomi Kalimantan Timur Terus Melesat*. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231106130601-4-486719/gencar-bangun-ikn-ekonomi-kalimantan-timur-terus-melesat>
- Saputra, M., & Hidayat, W. (2023). *Identifikasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi pada Tingkat Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan*. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Ejournal.Umm.Ac.Id*. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/27061>
- Saraswati, M. K., Ariananto, E., Adi, W., Perhubungan, K. S., Sekretariat, U., Ri, K., Hukum, A., Subbidang, S., Iklim, P., Lingkungan, P., & Sekretariat, H. (2022). *Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.3086/http>
- Senuk, A., Amin, C., & Yetty. (2019). *Konektivitas Pelabuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Maluku Utara*. *Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*. <http://jfred.unipa.ac.id/index.php/jfred/article/view/19/41>
- Septiantoro, A. A., Hasanah, H., Nugraheni, S. R., & Alexandi, M. F. (2020). *Apakah Kualitas Institusi Berpengaruh pada Arus Masuk FDI di Apakah Kualitas Institusi Berpengaruh pada Arus Masuk FDI di ASEAN?*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(2). <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.12>
- Singh, H., & Jun, K. W. (1995). *Some New Evidence on Deter-Minants of Foreign Direct Investment in Developing Countries*. Policy Research Working Paper.
- Sukirno, S. (2002). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro (3rd ed.)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumardjoko, I., & Akhmadi, MH. (2019). *Pengembangan Infrastruktur Konektifitas Sebagai Daya Ungkit Ekonomi Dan Pemangkas Kemiskinan Jawa Timur*. *Jurnal Manajemen Keuangan*. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/view/506>
- Syahrin, M. N. Al. (2018). *Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia*. *Ejournal.Undip.Ac.Id*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/20175>
- The World Bank. (2019). *Memahami Kemiskinan*. [https://www-worldbank-org.translate.google/en/topic/sanitation?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-worldbank-org.translate.google/en/topic/sanitation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th ed.)*.
- Yanuar. (2006). *Ekonomi Makro: Suatu Analisis untuk Konteks Indonesia Edisi 3*. *Pustaka Mandiri*. <http://www.lucidcafe.com/library/96mar/bell.html>